JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster

P-ISSN: 2807-8071, E-ISSN: 2807-7113 Volume 4 Issue 1, January-June 2024





Aktualisasi Fintech Syariah Dalam Persepektif Maqasid Syariah Pada Era Digital (Studi Pada Fintech Dana Dan Ovo)

Dwi Jaya Sofyan¹, Evi Fitriani², Friska Purnamasari³, Hanifatus Sholikhah^{4*} ^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Article Info Abstract

Article history:

Received October 10, 2024 Revised October 30, 2024 Accepted November 27, 2024 Available online June 1, 2024

*Corresponding author email:

dwijaya@gmail.com

Keywords:

Fintech, Dana dan Ovo, Era Digital, Maqashid Syariah **Introduction:** Teknologi keuangan saat ini berkembang begitu pesat dan menjadi pilihan bagi yang menginginkan masyarakat kecepatan layanan. Di sisi lain, teknologi keuangan syariah juga menjadi pilihan bagi masyarakat muslim, namun belum jeals apakah akan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aktualisasi teknologi keuangan syariah yang sesuai dengan magasid syariah serta hambatan yang dihadapi dalam teknologi menerapkan keuangan syariah. Research Methods: Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. **Results:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial penggunaan technology syariah pada fintech ovo dan dana sesuai dengan magasid syariah dalam hal menjaga harta dan kemaslahatan umat. Ini berarti menggunakan dompet elektronik (e-wallet) sebagai alat transaksi, bukan jual beli atau tukar menukar barang ribawi. Hambatan yang dihadapi dengan financial technology syariah adalah implementasi yang tidak dilakukan melalui proses akad secara tatap muka, dan masyarakat belum tidak begitu memahami tentang financial technology syariah.

DOI: 10.21154/joipad.v4i2.10066

Page: 36-45

JOIPAD Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)

PENDAHULUAN

Teknologi digital telah menghadirkan terobosan dan inovasi baru dalam berbagai sektor ekonomi, mempengaruhi perdagangan, pertanian, dan khususnya sektor keuangan. Salah satu inovasi terkini yang mendapat perhatian global adalah Financial Technology, atau yang lebih dikenal sebagai Fintech. Fintech merupakan bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak modern (Yudha, 2020). Pemerintah di berbagai negara telah memberikan perhatian terhadap perkembangan Fintech dengan merancang kebijakan dan peraturan yang mendukungnya. Di Indonesia, Fintech merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang signifikan, dan potensi produk keuangan yang belum tergarap dengan baik menciptakan pasar yang kuat untuk perkembangan Fintech. Sebanyak 36% dari populasi Indonesia tidak memiliki rekening bank, sehingga Fintech memiliki potensi untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan tradisional (Zaimsyah, 2019).

Fintech di Indonesia telah tumbuh pesat sejak tahun 2015 hingga akhir 2017, dengan sekitar 40 perusahaan Fintech syariah yang telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, prospek industri Fintech syariah di Indonesia terlihat sangat baik. Keseluruhan, Fintech di Indonesia memiliki potensi besar untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan tradisional.

Seiring perkembangan Fintech saat ini, penting untuk memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari Maysir, Gharar, dan Riba (Nafiah, 2019). Meskipun menggunakan teknologi modern, prinsip-prinsip hukum Islam harus tetap ditegakkan. Pendekatan dalam analisis ini menggunakan maqashid syariah sebagai landasan utama dalam menentukan ijtihad hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan korelasi antara praktik Fintech dengan prinsip- prinsip yang terkait dengan tema penelitian ini. Salah satu produk ekonomi syariah yang telah menjadi populer adalah Financial Technology. Fintech menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi, mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Dengan Fintech, transaksi keuangan yang sebelumnya memerlukan tatap muka dan uang tunai dapat dilakukan secara jarak jauh dalam hitungan detik. Di Indonesia, Fintech semakin berkembang berkat pertumbuhan penggunaan internet yang pesat dan jumlah pengguna yang terus meningkat. Fintech dapat dianggap sebagai perangkat lunak yang memfasilitasi berbagai layanan keuangan4.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri Fintech syariah 5 . Keseluruhan, Fintech di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, ledakan dalam penetrasi seluler menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan pesat industri Fintech.

Melalui penggunaan konsep pemikiran maqashid syariah di era digital sekarang ini, hendaklah mampu menghitung tingkatan aktualisasi ketika pengguna payment gateway dalam melaksanakan proses pembelian di fintech OVO dan Dana. Penelitian ini, menggunakan

2 studi kasus dari beragam mobile payment brand yang terdapat di Indonesia, karena apabila dilihat terdapat brand OVO dan Dana yang memiliki keunggulan yang digunakan dalam pelayanan yang diberikan. Peneliti tertarik meneliti mengenai "Aktualisasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Magashid Syariah pada Era Digital (Studi pada Fintech Dana dan OVO).

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian ini data yang digali bersumber dari pernyataan atau gambaran yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai situasi sosial dan untuk mengklarifikasi mengenai suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daata sekunder yang diambil melalui library kepustakaan dengan cara membaca dari buku-buku, kitab-kitab, dan dokumen-dokumen yang berkaitan.

Untuk menempatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan adalah Penelusuran data online / internet searching. Internet searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat / mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Internet searching sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu file /data dimana kecepatan, kelengkapan dan ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia. Mencari data di internet bisa dilakukan dengan cara searching, browsing, surfing ataupun downloading.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari membaca buku-buku, informasi-informasi dan dokumen yang berkaitan. Yang mana agar mudah dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahamioleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan DANA

DANA adalah layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya, berbasis mobile yang dapat digunakan melalui Perangkat Telekomunikasi. DANA diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe ("EDIK") yang merupakan pemegang lisensi resmi dan telah memperoleh izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran Kategori I (Satu) yang meliputi aktivitas Account Issuance Services (AIS) (termasuk penerbit uang elektronik), Payment Initiation dan/atau Acquiring Services (PIAS) (termasuk penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara payment gateway, layanan acquirer), dan layanan remitansi serta Layanan Keuangan Digital (LKD) dari Bank Indonesia.

a. Laporan Posisi Keuangan

BAZNAZ X Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2020

		2020	
ASET			
	Aset Lancar		
	Kas dan Setara Kas	xxx	
	Piutang	xxx	
	Biaya Dibayar Dimuka	xxx	
	Jumlah Aset Lancar	XXX	
	Aset Tidak Lancar		
	Aset Tetap-Nilai Bersih	xxx	
	Jumlah Aset Tidak Lancar	XXX	
	Aset Lain-Lain		
	Aset Lain-Lain		
	Jumlah Aset Lain-Lain	XXX	
TOTAL A	ASET	XXX	
LIABILIT	AS DAN SALDO DANA		
	Liabilitas	xxx	
	Liabilitas Jangka Pendek	xxx	
	Liabilitas Jangka Panjang	xxx	
	Jumlah Liabilitas	XXX	
	Saldo Dana	XXX	
	Saldo dana zakat	XXX	
	Saldo dana infak/sedekah	xxx	
	Saldo dana amil	xxx	
	Jumlah Saldo dana	XXX	
TOTAL	IABILITAS DAN SALDO DANA	XXX	

b. Laporan Perubahan Dana

BAZNAZ X

Laporan Perubahan Dana

Untuk Tahun yang Berakhir Desember 2020

		2020
DANA		
AMIL		
	Penerimaan Dana Amil	

Bagian Amil dari dana Zakat	XXX
Bagian Amil dari Dana sedekah/Infak	XXX
Penerimaan Amil dari APBD	XXX
Peneyesuaian Saldo Awal Dana Amil	XXX
Jumlah Penerimaan Dana Amil	XXX
Penggunaan Dana Amil	
Beban Pegawai	XXX
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki	XXX
Beban Telepon, Listrik dan Internet	XXX
Beban Pemeliharaan Aset	XXX
Beban Perjalanan Dinas	XXX
Beban Administrasi dan Umum	XXX
Beban Penyusutan	XXX
Beban Penggunaan Dana APBD	XXX
Jumlah Penggunaan Dana Amil	XXX
Surplus (Defisit) Dana Amil	XXX
Saldo Dana Amil Awal Periode	(XXX)
 Saldo Dana Amil Akhir Periode	XXX

c. Laporan arus Kas

BAZNAZ X LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir 2020

		2020
ARUS KAS	DARI AKTIVITAS OPERASI	
	Penerimaan Dana Zakat	XXX
	Penyaluran Dana Zakat	(xxx)
	Penerimaan dana Infak/Sedekah	XXX
	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	(xxx)
	Penerimaan Dana Amil	XXX
	Penggunaan Dana Amil	(xxx)
	Kenaikan/(Penurunan) Piutang	xxx
	Kenaikan/(Penurunan) Biaya Dibayar di muka	XXX
	Kenaikan/(Penurunan) Aset Lain-Lain	XXX
	Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas	XXX
	Arus Kas Bersih digunakan Aktivitas Operasi	
ARUS KAS	DARI AKTIVITAS INVESTASI	
	Perolehan Aset Tetap	XXX
	Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	XXX
	Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	XXX
	Saldo kas dan Setara Kas Awal Periode	XXX
	Saldo kas dan Setara Kas Akhir Periode	XXX

Sistem Keuangan yang Transparan dan Akuntabel pada zakat

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan dan distribusi zakat menjadi permalahan zakat di Indonesia. Ketidaktransparanan ini terlihat dengan kurangnya informasi yang beredar pada masyarakat mengenai pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat. Terdapat dua faktor yang menyebabkan ketidaktransparanan, pertama yaitu minimnya publikasi jumlah dana zakat yang terkumpul dan bagaimana penyaluran dana tersebut. Masyarakat tidak memiliki akses dan informasi terhadap besaran dana zakat yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat menurun dan keraguan dalam pembayaran zakat. Kedua minimnya kontrol dan audit eksternal terhadap Lembaga pengelola zakat berdampak pada ketidaktranspararan pengelolaan, tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mengaudit dan mengawasi penggunaan dana zakat, mengakibatkan pengelola zakat dengan mudah mengabaikan transparansi ini (Risnawati, Ayu, Muin, & Luthfi, 2023)

Permasalahan ini perlu diatasi dengan meningkatkan transparansi pengelolaan zakat baik saat pengumpulan maupun pendistribusian. Pengelola zakat perlu mewajibkan publikasi data secara terbuka mengenai jumlah data, alokasi dana, serta hasil dan manfaat yang telah dicapai. Hal lain yang dapat mendukung transparansi zakat adalah adanya laporan secara terbuka dan berkala yang dikeluarkan oleh Lembaga zakat, dengan adanya ini akan mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembayaran zakat, semakin masyarakat dapat mengakses kemudahan data, maka semakin menigkat kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya memutuskan berzakat pada lembaga tersebut.

Upaya transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan solusi dalam masalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang tinggi dalam meyakinkan masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan sampai kepada yang berhak menerimanya serta digunakan untyk tujuan tepat. Beberapa langkah dalam transparansi yang dapat dilakukan dimulai dari proses pengumpulan zakat dilakukan dengan terbuka, mekanisme pengumpulan zakat di informasikan dengan jelas, terkait jenis zakat yang diterima termasuk metode pembayaran, batas waktu pembayaran serta *person in contact* dalam pengumpulan zakat. Kedua, proses dalam pendistribusian zakat perlu dilakukan pembaharuan dalam sebuah sistem yang transparan dan akuntabel, dimana Lembaga zakat menyusun SOP terkait proses penerimaan dan penyaluran zakat secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana zakat akan didistribusikan. Lembaga zakat secara terbuka juga menginformasikan laporan terperinci mengenai jumlah zakat yang terkupul, daftar penerimaan zakat, dan penggunaan zakat, dimana laporan ini dapat diakses secara bebas melalui website, media sosial maupun kontak yang telah ditunjuk. Melalui upaya ini, masyarakat secara berkala dapat memantau pengelolaan zakat.

Beberapa penelitian terdahulu terkait praktik akuntansi dan kepatuhan dalam pelaporan keuangan telah banyak dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Nurazizah, Sulaeman dan Kartini bahwa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Baznaz Kabupaten Sukabumi sudah menerapkan PSAK 109 namun dalam laporan keuangannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK (Nurazizah, Sulaeman, & Kartini, 2019). Penelitian lain

mengenai kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 di Baznaz Kota Bandung yang dilakukan Lina menghasilkan kesimpulan bahwa Baznaz Kota Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana zakat dan infak, ditunjukkan dengan adanya kesesuaian hasil laporan keuangan dengan format yang terdapat dalam PSAK 109.

Model Pengelolaan Zakat Digital

Era Modern ini, pengelolaan zakat telah banyak mengalami perkembangan. Terdapat dua jenis model zakat yang diakomodasi oleh pemerintah, yakni model pertama adalah obligatory, yaitu negara atau Lembaga yang ditunjuk secara resmi dapat memaksa pembayaran zakat pada Muzaki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Negara dengan model pertama ini umunya dilakukan di Timur Tengah seperti Libya, Saudi Arabia, Yaman dan Pakistan. Sementara itu model kedua non obligatory, yaitu berdasarkan kesukarelaan. Negara yang menggunakan model ini umunya mayoritas berpenduduk muslim namun landasan pemerintahan dan negaranya tidak menggunakan hukum Islam. Indoensia termasuk dalam model non obligatory ini, meskipun terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang zakat, namun tidak memaksa pembayaran zakat, lebiih kepada kesukarelaan (Isvadiary, 2010).

Menurut Hasan Bahrom dalam Mubarok & Fanani, terdapat tiga faktor dalam pengumpulan zakat, diantaranya adalah akuntabilitas amil zakat, ketidakpahaman masyarakat dalam pembayaran zakat pada amil serta lemahnya regulasi zakat (Mubarok & Fanani, 2014). Pertama, akuntabilitas amil zakat sangat berpengaruh terhadap pengumpulan zakat. Akuntanbilitas ini berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat karena tanggung jawab dan keterbukaan amil zakat dalam pelaporan zakatnya. Sebaliknya, apabila masyarakat banyak ragu dalam pengumpulan zakat, disebabkan amil zakat berafiliasi dengan partai politik atau Lembaga dengan citra negatif, seperti korupsi. Faktor kedua yakni ketidakpahaman masyarakat, berdasarkan penelitian, pada negara berkembang, tingkat pendidikan yang relatif rendah berdampak pada pemahaman serta perilaku pembayar zakat yang masih karikatif. Ketiga, lemahnya regulasi yang mengatur tentang zakat, hal ini didasarkan pada model *non obligatory*, yakni kesukarelaan. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan muslim terbanyak, namun pembayaran zakat tidak bersifat memaksa seperti pajak. Tidak ada sanski bagi muzaki yang tidak membayar zakat seperti halnya sanski pada saat tidak membayar pajak.

Digitalisasi zakat telah dimulai sejak tahun 2016, dengan adanya lima platform yang disediakan oleh BAZNAZ, yaitu pertama Webiste BAZNAZ dan aplikasi "Muzaki Corner". Kedua, platform komersial hasil pengembangan serta Kerjasama dengan *e-commerce* seperti Shoppe, Lazada, BliBli dan fintech lainnya seperti Ovo, Gopay dan lainnya. Ketiga, platform media sosial seperti adanya sponsor dan kampanye zakat melalui Instagram, facebook, twitter dan lainnya. Keempat, platform Inovasi yakni BAZNAZ menciptakan platform layanan menggunakan inovasi QR Code. Kelima adalah menggunakan kampanye *chatbot* pada aplikasi LINE Bernama Zavira (*Zakat Virtual Assistant*).

Strategi pengumpulan zakat melalui digitalisasi zakat ini terbukkti mengalam kenaikan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2016 telah terjadi kenaikan pengumpulan zakat 1% yang pada akhirnya tahun 2019 naik hingga 14%. Kenaikan ini didorong dengan adanya fatwa MUI untuk dalam pengumpulan dan pengelolaanya dilakukan tidak berkerumun, sebagai salah satu Solusi masa pandemi, zakat digital hadir mendukung fatwa tersebut. Selain itu, kehadiran zakat digital mampu menurunkan angka kemiskinan akibat pandmei covid 19 (Rohman, 2021).

Digitalisasi zakat menjadi salah satu program kolaborasi BAZNAZ dengan *fundraising* platfrom. Fundraising adalah kegiatan yang bertujuan mendorong masyarakat agar bersedia melakukan amal Kebajikan dengan memberikan dana atau sumber daya lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini untuk meningkatkan jumlah donator dan besaran donasi serta dapat mengenalkan Lembaga kepada masyarakat (Kasri & Putri, 2018). Penelitian lain yang mendukung digitalisasi zakat adalah perilaku konsumen, dinilai lebih reaktif, interaktif dan penh pertimbangan dalam melihat produk dan jasa, masyarakat menilai adanya kemudahan sera awaktu dan prsoses yang ditawarkan oleh Lembaga zakat menjadi poin penting sebagai pertimbangan muzaki mebayar zakat (Nurhablisyah, 2017). Diyakini dengan cara ini, zakat digital mampu meningkatkan pengumpulan zakat 5% dari transaksi ekonomi yang berdampak pada kenaikan 10% dari keseluruhan zakat yang dihimpun di Indonesia (Rohim, 2019).

Dalam penelitiannya, Risnawati dkk menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital saat ini tidak hanya dalam rangka memudahkan muzaki, namun juga memudahkan Lembaga zakat dalam pelaporannya secara *real time*. Penggunaan aplikasi maupun platform digital dapat memudahkan masyarakat dalam memantau pelaporan penggunaan dana zakat, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat ditingkatkan (Risnawati, Ayu, Muin, & Luthfi, 2023). Dengan digitalisasi ini semakin memudahkan kedua belah pihak dalam pengelolaan zakat.

Pelaporan Akuntansi untuk lembaga zakat, Baznaz telah menciptakan aplikasi berbasis web Bernama SIMBA, yaitu singkatan dari Sistem Manajemen Informasi Baznaz. Aplikasi ini dapat pula di *download* pada *playstore* dengan nama Simba Lite (BAZNAZ, 2024). Tujuan adanya apliaksi SIMBA adalah mendukung kinerja pelayanan, akuntabilitas, pengelolaan zakat serta memberikan informasi terbuka dan bebas kepada Muzaki yang terdaftar di Baznaz. Dengan adanya SIMBA, diharapkan salah satu tujuan pengelolaan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanna zakat dapat tercapai.

Apri Hernawan dalam Siti Jubaedah Anuri menjelaskan bahwa aplikasi ini pada sisi Muzaki sangat membantu terkait validitas data dan validitas pembayaran. Muzaki yang telah membayar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi langsung ucapan terimakasih, serta mendapatkan bukti setor zakat secara digital yang dikirimkan melalui kontak atau email. Pada sisi mustahik, aplikasi SIMBA secara tidak langusng juga membawa perubahan, yakni mustahik mendapatkan bukti kitansi penyaluran dari Baznaz (Anuri, 2024).

Aplikasi SIMBA selain sebagai bukti penyaluran, juga membawa perubahan pada bukti pelaporan. Bidang keuangan Baznaz harus melakukan update pelaporan keuangan secara

triwulan. Admin SIMBA setelah melakukan upload data pada aplikasi, data tersebut langsung terintegrasi ke Pusat. Hal ini berdampak pada semakin kuatnya sistem pengelolaan zakat baik secara lokal maupun nasional dan lebih transpatan serta akuntabel

KESIMPULAN

Standar pelaporan zakat telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 109. PSAK ini mengatur mengenai laporan zakat seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Arus kas, serta pendukung lainya seperti Catatan Atas Laporan keuangan (CALK). Laporan ini diperlukan dalam upaya meningkatkan masyarakat, karena kepercayaan masyarakat pada Lembaga pengelola zakat masih rendah, akibat kurang transparansinya pengelola zakat atas data-data mengenai jumlah pengumpulan zakat dan jumlah penyaluran zakat, dan belum adanya sistem audit eksternal kepada seluruh pengelola zakat yang menyebablan pengelola kurang memperhatikan kewajiban dalam membuat laporan keuangan. Sejak tahun 2016, mulai dikenal zakat digital melalui platform yang disediakan Baznaz yang mampu meningkatkan penerimaan zakat sebesar 10% dari keseluruhan dana zakat yang dihimpun. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, Baznaz mengeluarkan sistem manajemen pelaporan terintegrasi yang dinamakan SIMBA, yakni Sistem Informasi Manajemen Baznaz. Aplikasi ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat karena selain terdapat bukti penyaluran dana zakat, masyarakat dapat memantau laporan keuangan yang diperbarui setiap 3 bulan sekali melalui aplikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, M., Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. (2022). Metide Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 974-980.
- Anggito, & Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV jejak.
- Anuri, S. (2024). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sitem Informasi manajemen Baznaz (Simba) pada Pelaporan Pengelolaan dana ZIS pada Bazanaz Kabupaten Banyumas.

 Purwokero: UIN Saizu.
- Baznaz. (2020). Outlook Zakat Indonesia 2020. Jakarta: Pusat kajian Strategis Baznaz.
- BAZNAZ. (2024). Tingkatkan Pelaporan Pengelolaan Zakat Via Digital, Baznaz Gelar BImtek Input Data Pelaporan di Kendari. Kendari: Humas Provinsi Sulaswesi Tenggara.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi lapangan.*Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Hidayat, Rohaeni, & Zanatun. (2018). Implementasi PSAK 109 pada Rumah Yatim Arrohman. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol. 1, No. 1, 18.
- Isvadiary, R. (2010). Penerapan Obligatory Sistem dalam pengelolaan Zakat di Indonesia. Journal Syariah LKIHI Edisi II, 61-66.

- Kasri, R., & Putri, N. (2018). Fundraising Strategies t Optimize Zakat Potemtial in Indonesia: An Explanatory Qualitative Study. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Syariah, Vol. 10, No. 1*, 1-24.
- Kemenkeu, H. (2024). *Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menurun*. Sekertaris kabinet Republik Indoensia.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional, Potensi Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat. *Permana, Vol. 5, No. 2,* 1-14.
- Nurazizah, Sulaeman, & Kartini. (2019). Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada penyajian Laporan Keuangan Baznaz Sukabumi. *Jurnal Atestasi, Vol. 2, No. 2,* 81.
- Nurhablisyah. (2017). Perilaku Konsumen di Era Digital, Tinjauan Terhadap Pembaca HAI Online. *Jurnal Magenta, STMK Trisaksi, Vol. 1, No. 2*.
- Risnawati, Ayu, A. N., Muin, R., & Luthfi, M. (2023). Permaslaahn dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 3*, 2527-2541.
- Rohim, A. (2019). ptimalisasi Penghipunan Zakat Melalui Digital . *Al Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 4, No. 1*.
- Rohman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengelolaan Zakat). *Dirosat: ournal of Islamic Studies Vol 6, No. 2*, 2541-1675.
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK !)(Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Baznaz Kota bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 3, No. 1*.